

**ALASAN MASYARAKAT DAN ELIT POLITIK MEMPERJUANGKAN
DAERAH OTONOMI BARUKABUPATEN RENAH INDO JATI**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai salah satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan*



ANGGIA TRISOLA

TM/NIM: 2012/1201760

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

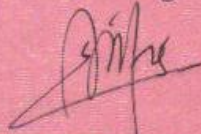
ALASAN MASYARAKAT DAN ELIT POLITIK MEMPERJUANGKAN
DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN RENAH INDO JATI

Nama : Anggia Trisola
TM/NIM : 2012/1201760
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 Januari 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dra. Al Rafni, M. Si
NIP. 19680212 199303 2 001

Pembimbing II



Alia Azmi, S.IP, M. Si
NIP. 19820904 200812 2 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

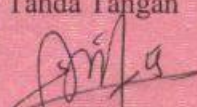
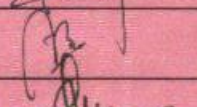
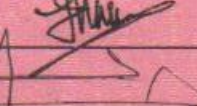

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Kamis, 7 Januari 2016 Pukul 10.30 s/d 12.30 WIB

Alasan Masyarakat dan Elit Politik Memperjuangkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Renah Indo Jati

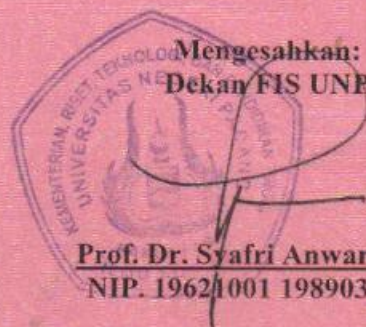
Nama : Anggia Trisola
TM/NIM : 2012/1201760
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 Januari 2016

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Al Rafni, M. Si	
Sekretaris	: Alia Azmi, S.IP, M. Si	
Anggota	: Dr. Maria Montessori, M.Ed, M. Si	
Anggota	: Dr. Akmal, SH, M. Si	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANGGIA TRISOLA
TM/NIM : 2012/1201760
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Alasan Masyarakat dan Elit Politik Memperjuangkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Renah Indo Jati” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 11 Januari 2016

Saya yang menyatakan


ANGGIA TRISOLA
NIM. 1201760

ABSTRAK

**Anggia Trisola, 2012/1201760: Alasan Masyarakat dan Elit Politik
Memperjuangkan Daerah Otonomi Baru
Kabupaten Renah Indo Jati**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan dikeluarkannya Amanat Presiden (Ampres) Nomor R-66/PRES/XII/2013 tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) 65 Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia. Kebijakan ini merupakan kesempatan atau peluang yang besar untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi apa saja alasan masyarakat dan elit politik memperjuangkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Renah Indo Jati.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data melalui cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan Masyarakat dan Elit Politik Memperjuangkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Renah Indo Jati diantaranya: 1) Adanya peluang untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB), 2) Kondisi geografis yang luas dan pelayanan publik yang tidak efektif dan efisien, 3) Dukungan yang tinggi dari masyarakat, elit politik dan pemerintahan kabupaten, 4) Dukungan dana, 5) Pemerataan dan keadilan, 6) Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).

Keyword: Alasan Masyarakat, Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Renah Indo Jati

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Alasan Masyarakat dan Elit Politik Memperjuangkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Renah Indo Jati”. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Saryusni yang telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.

3. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
4. Ibu Dr. Maria Montessori M.Ed., M.Si dan ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku ketua dan sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
5. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku Pembimbing I dan ibu Alia Azmi, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
6. Bapak Dr. Hasrul, Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si dan Bapak Dr. Akmal, SH, M. S.i selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Dr. Fatmariza M.Hum selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu staf pengajar dan kepastakan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Bapak H. Raswin SH, MM, Bapak H. Drum, Bapak Ir. Nasution, Bapak Syahbunan Richi S.pdI, Ibu Nur Aini, Bapak Mukhtar Is, SE, Bapak Drs. Ferry, Bapak Sutan Heriyadi, S.Sos, Bapak Dharmansyah dan Bapak Zalkafli S.pd, bapak Fani, Suwardi dan Harri Senja yang telah membantu dalam penelitian.

10. Teman-teman PPKn 2012 dan senior PPKn serta Junior yang telah banyak membantu.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun/konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirulalam, penulis ucapkan terimakasih.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, dan bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan mendapat imbalan dari Allah SWT, Aamiin.

Padang, 11 Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan masalah.....	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Pembatasan Masalah.....	6
3. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis.....	8
1. Otonomi Daerah	8
a. Dasar hukum Otonomi Daerah.....	8
b. Pengertian Otonomi Daerah	9
c. Prinsip dan Tujuan Otonomi Daerah.....	14
2. Proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru.....	17
a. Dasar Hukum Pemekaran Wilayah.....	17
b. Pengertian pemekaran wilayah.....	18
c. Tujuan Pemekaran Wilayah.....	19
d. Syarat-Syarat dan Mekanisme Tata cara Pembentukan Daerah Otonomi Baru.....	20
3. Alasan-alasan pembentukan Daerah Otonomi Baru.....	29
B. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Informan Penelitian	33
D. Jenis, Sumber, Teknik Dan Alat Pengumpulan Data.....	34
1. Jenis dan Sumber Data.....	34
2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
1. Temuan Umum.....	38
a. Gambaran umum Pesisir Selatan.....	38
a) Sejarah Singkat Kabupaten Pesisir Selatan.....	38
b) Letak Administratif.....	39
c) Letak Geografis.....	39
b. Rancangan calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Renah Indo Jati terdiri dari 6 Kecamatan.....	40
1. Sejarah singkat kabupaten Renah Indo Jati.....	40
2. Letak administratif	41
3. Letak geografis	42
4. Jumlah penduduk.....	42
5. Perekonomian dan Potensi daerah.....	42
6. Pariwisata Daerah.....	43
7. Sosial budaya.....	44
1. Kecamatan Air Pura.....	44
2. Kecamatan Pancung Soal.....	44
3. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.....	45
4. Kecamatan Renah Ampek Hulu Tapan.....	46
5. Kecamatan Lunang.....	47
6. Kecamatan silaut.....	48
2. Temuan khusus.....	48
1. Alasan masyarakat dan elit politik memperjuangkan Daerah otonomi Baru Kabupaten Renah Indo Jati.....	48
a. Adanya peluang kembali untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB).....	49
b. Kondisi geografis yang luas dan pelayanan publik yang tidak efektif dan efisien.....	52
c. Dukungan yang tinggi dari masyarakat, elit politik dan pemerintahan kabupaten.....	55
d. Dukungan dana.....	57
e. Pemerataan dan keadilan.....	59
f. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).....	62
B. Pembahasan	66
1. Alasan masyarakat dan elit politik memperjuangkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Renah Indo Jati.....	66
1. Adanya peluang kembali untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB).....	67
2. Kondisi geografis yang luas dan pelayanan publik yang tidak efektif dan efisien.....	72

3. Dukungan yang tinggi dari masyarakat, elit politik dan pemerintahan kabupaten.....	75
4. Dukungan dana.....	76
5. Pemerataan dan keadilan.....	77
6. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).....	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Peta Kabupaten Pesisir Selatan..... 42

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Daftar Informan Penelitian.....	33
2. Faktor utama pembentukan Daerah Otomi Baru Kabupaten Renah Indojati.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara	85
2. Daftar Informan	86
3. Susunan Panitia Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Renah Indo Jati.....	87
4. Dokumentasi.....	88
5. Surat Tugas.....	89
6. Izin Penelitian.....	90
7. Izin Penelitian.....	91
8. Keterangan Penelitian.....	92

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Saat ini, dalam perkembangannya, yang terdiri dari 34 Provinsi, 411 Kabupaten, dan 93 Kota. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan sekitar 60% Daerah Otonomi Baru (DOB) terutama kabupaten/kota yang sekitar 17 tahun lalu hanya sekitar 346 kabupaten/kota kini menjadi menjadi 538 kabupaten/kota.

Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionya maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya. Semakin luas area wilayahnya maka semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakatnya.

Kondisi ini dapat dilihat dari semakin luas dan rapatnya jaringan jalan, semakin luas dan banyaknya perkantoran, perdagangan, industri, serta semakin padatnya pemukiman penduduk. Seharusnya, kondisi ini menentukan semakin meningkatnya peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Jika dari desa akan tumbuh kota maka dari kota akan tumbuh kota-kota kecil menjadi kota besar sebagai lokasi pemukiman baru. Dan, jika semakin luas rentang kendali pelayanan publik yang dirasakan masyarakat,

saat ini cenderung adanya keinginan memisahkan diri dari desa/kota induk dan semakin luas memisahkannya suatu kabupaten/kota dari kabupaten/kota induk. Hal ini bisa lebih luas lain dengan memisahkannya kabupaten/kota dari provinsi induk membentuk sebuah provinsi atau wilayah administratif sendiri.

Di Indonesia, perkembangan wilayah setelah tahun 1999 mengalami perubahan seiring bergulirnya era reformasi. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi (Otonomi Daerah). Menurut Koswara Dalam buku Andi Kasmawati (2010:49): Desentralisasi pada dasarnya mempunyai makna bahwa : Melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada badan-badan/lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Prakarsa untuk menentukan prioritas, memilih alternatif dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan daerahnya, baik dalam hal menentukan kebijaksanaan, perencanaan, maupun pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Demikian pula hak yang menyangkut pembiayaan dan perangkat pelaksanaannya, baik personil maupun alat perlengkapan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah yang bersangkutan.

Kebijakan itu tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004. Guna mengimplementasikan kebijakan itu maka dikeluarkan PP No. 129

Tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah otonom baru, penghapusan dan penggabungan daerah otonom. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diganti dengan PP No. 78 Tahun 2007.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 4 ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam Pembentukan Daerah Otonom memiliki persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 persyaratannya meliputi Syarat administratif, untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Syarat teknis sebagaimana dimaksud meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Syarat fisik sebagaimana dimaksud meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima)

kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah memiliki 3 (tiga) persyaratan pula, yaitu: persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan: (1) Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat, (2) Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, (3) Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. (Pasal 5, 6 dan 7)

Itulah syarat-syarat yang harus di penuhi dalam memperjuangkan suatu daerah menjadi Daerah Otonomi Baru. Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh berkembang dan mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Fenomena dan keinginan masyarakat untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) juga terasa pada masyarakat di enam kecamatan paling

selatan. Menurut panitia percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang bernama H. Raswin SH, MM (Wawancara jumat, 19 Maret 2015) menurutnya sejak tahun 2003, masyarakat dan elit politik di enam kecamatan paling selatan telah memperjuangkan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberi nama Renah Indo Jati.

Meskipun sejak Tahun 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) memerintahkan moratorium (pemberhentian sementara) pemekaran atau pembentukan daerah. Namun faktanya masih banyak masyarakat mengusulkan Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Termasuk masyarakat dan elit politik di enam kecamatan paling selatan. Hal ini disebabkan pada tanggal 27 Desember 2013 Presiden SBY mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) Nomor R-66/PRES/XII/2013 tentang Rancangan Undang-undang (RUU) 65 Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia dan juga menyetujui pembahasan 65 Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB). Termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Renah Indo Jati (RIJ) Pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.

Dengan kebijakan ini, berarti adanya kesempatan atau peluang yang besar untuk membentuk Daerah Otonomi Baru, sehingga masyarakat dan elit politik di enam Kecamatan paling ujung Pesisir Selatan yang hingga saat ini masih terus memperjuangkan calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Renah Indo Jati. Berdasarkan permasalahan di atas, penting dilakukan penelitian untuk mengungkapkan studi kasus tersebut. Untuk itu penulis ajukan sebuah

judul penelitian tentang “Alasan Masyarakat dan Elit Politik
Memperjuangkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Renah Indo Jati”

B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan moratorium Pemekaran yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
- b. Fenomena keinginan masyarakat di berbagai daerah untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB)

2. Pembatasan Masalah

Banyaknya permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang masalah, tetapi untuk lebih efektifnya penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini kepada alasan masyarakat dan elit politik memperjuangkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Renah Indo Jati.

3. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang dan batasan masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu apa saja alasan masyarakat dan elit politik memperjuangkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Renah Indo Jati?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apa saja alasan masyarakat dan elit politik memperjuangkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Tanah Bata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis : diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang Politik, khususnya mengenai wacana Sistem Pemerintahan Daerah.
- b. Secara Praktis
 - a) Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam hal memahami pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
 - b) Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana program Strata Satu (S-1) di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu-ilmu social Universitas Negeri Padang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang penulis lakukan di enam Kecamatan paling ujung Pesisir Selatan khususnya Kec.Pancung Soal, Kec. Air pura, Kec.Basa Ampek Balai Tapan, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan, Kec. Lunang dan Kec. Silaut, dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat dan elit politik memperjuangkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Renah Indo Jati, diantaranya:

1. Adanya peluang kembali untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) karena Presiden SBY telah mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) Nomor R-66/PRES/XII/2013 tentang Rancangan Undang-undang (RUU) 65 Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia dan juga menyetujui pembahasan 65 Rancangan Undang-Undang (RUU).
2. Kondisi geografis yang luas dan pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan efisien, dengan kondisi yang sangat luas membuat masyarakat sulit mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien, sehingga masyarakat dan elit politik berjuang membentuk DOB agar jika DOB disahkan masyarakat tidak meyulitkan mendapatkan pelayann publik.
3. Dukungan yang tinggi dari masyarakat, elit politik dan pemerintahan kabupaten, dalam pembentukan DOB RIJ mendapat dukungan dari berbagai elemen, baik itu masyarakat, elit politik maupun pemerintahan kabupaten.

4. Dukungan dana, Pembentukan DOB RIJ mendapat dukungan dana sebanyak 5 M dari pemerintah kabupaten dan pemprov jika nantinya pembentukan RUU DOB disahkan.
5. Pemerataan dan keadilan karena selama ini masyarakat merasa kurangnya pemerataan dan keadilan yang di peroleh oleh masyarakat, terbukti banyaknya ketimpangan pembangunan yang terjadi di enam kecamatan, Pemkab lebih memperhatikan masyarakat dekat dengan ibukota dari pada enam kecamatan.
6. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mengoptimalkan Dalam Rencana Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Renah Indo Jati, yaitu :

1. Dalam Pembentukan Daerah Otonomi baru Kabupaten Renah Indo Jati, hendaknya kinerja panitia lebih ditingkatkan lagi agar pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Renah Indo Jati terlaksana.
2. Hendaknya pemerintah dan DPR RI, segera membahas seluruh Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru diseluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Rozali, 2000. *Pelaksanaan otonomi luas dan isu federalisme sebagai suatu alternative*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Darmadi.2012. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial; Konsep Dasar Dan Teori*.Bandung : Alfa Beta
- Harmantyo, D. 2007, *Kebijakan Desentralisasi Dan Implementasi Otonomi Daerah Diindonesia*. Jurnal makara.Vol.6, 007.Universitas Indonesia. Depok
- Iskandar.2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan sosial (kuantitatif dan Kualitatif)*.Jakarta : Gaung Persada Press
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Propek otonomi daerah di Negara republic Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kasmawati Andi. 2010. *Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi*. Rayhan Intermedia : Makassar
- Rasyid, 1997.*Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Sumbawa
- SoejitoIrawan.1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.Rineka Cipta: Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfa Beta
- Sunarno, Siswanto, 2005. *“Hukum Pemerintahan Daerah”*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Syafril Efendi, dkk. 2005. *Buku Ajar Sistem Pemerintahan Daerah (SISPEMDA)*. Padang: Prodi PPKn UNP
- Syaukani HR. 2001. *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerakan Pengembangan Peberdayaan Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur*
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance (telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Insan Cendikia : Surabaya.
- Widjaja, H.A.W. 2005. *“Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada